Bali Post

Dari Kunker Spesifik Komisi IV DPR-RI

Badung Bangun Irigasi dan Cetak 100 Hektar Sawah Baru

KUNJUNGAN kerja (kunker) spesifik Komisi IV DPR-RI, Selasa (7/4) kemarin, di Subak Liplip Desa Canggu Kecamatan Kuta utara Kabupaten Badung diterima Sekda Badung Kompyang R. Swandika didampingi Kabid PLA Dinas Pertanian Badung A.A. Rai Wirawan, Camat Kuta Utara A.A. Yuyun Hanura Eny di hamparan sawah depan Balai Subak Liplip, Desa Canggu. Kunker delapan anggota Komisi IV DPR-RI itu untuk melakukan peninjauan serta bertatap muka dengan petani terkait dengan alih fungsi lahan pertanian. Kunker dipimpin Drs. H. Ibnu Multazam dari Fraksi PKB didampingi Sudin, Yadi Srimulyadi, Drs. I Made Urip, dan Efendi Sianipar dari Fraksi PDI-P serta anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi Gerindra.

Bupati Badung diwakili Sekda Badung Kompyang R. Swandika mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung didukung penuh DPRD telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Di antaranya memberikan insentif berupa pembebasan PBB, pemberian insentif berupa bibit dan benih serta sarana produksi lainnya. Juga, dengan menyiapkan SDM di bidang pertanian. Pemerintah dengan dukungan dewan telah menyiapkan SDM di bidang pertanian dengan membangun SMK Pertanian plus pariwisata di Petang. Saat ini, animo masyarakat untuk menyekolahkan ankanya di SMK Petang ini terus meningkat. Sebab, terbukti tamatannya dapat langsung terserap di pasar kerja, baik sebagai *gardener* di hotel maupun melakukan usaha di perusahaan swasta.

Sebagai wujud komitmen menjaga alih fungsi lahan pertanian, lanjutnya, Pemkab Badung juga telah membangun jaringan irigasi secara permanen. Termasuk, dengan membuat terowongan irigasi sepanjang 8 km di Subak Pangsut Sari, Petang. Dengan terbangunnya terowongan ini, akhirnya dapat membuka lahan sawah baru seluas 100 hektar lebih.

Kadis Pertanian Badung diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) A.A. Rai Wirawan melaporkan, luas sawah di Badung dari lima kecamatan 10.144 hektar. Selama tahun 2014, terjadi alih fungsi 160 hektar (1,5%) sehingga lahan di Badung sekarang mencapai 9.984 hektar. "Data ini kita bahas di perencanaan untuk menjadi lahan berkelanjutan sesuai UU 41 Tahun 2009 tentang ketahanan pangan," jelasnya.

SPESIFIK - *Kunker spesifik Komisi IV DPR-RI, Selasa (7/4) kemarin di Subak Liplip Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung diterima Sekda Badung Kompyang R. Swandika.*

Hal senada diungkapkan Camat Kuta Utara A.A. Yuyun Hanura Eny. Menurutnya, perkembangan wilayah Kuta Utara cukup pesat. Di Kuta Utara terdapat 19 subak dengan luas lahan 1.430 hektar. Untuk alih fungsi, pada tahun 2014 ini mencapai 123 hektar. "Dari 19 subak tersebut, hanya empat yang masih eksis dengan nol alih fungsi lahannya," tambahnya. **(532)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 2

Bali Post

Anggaran Pilkada Seperti Benang Kusut

Bali Post/kmb

RAPAT - *Rapat kerja Komisi A DPRD dengan Sekda, Kapolres, KPU serta instansi terkait di gedung DPRD membahas mengenai anggaran Pilkada 2015.*

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 14

Bali Post

Sambungan.

Negara (Bali Post) -

Menjelang pelaksanaan Pilkada 2015 Desember mendatang, anggaran pilkada masih seperti benang kusut. Karena hingga saat ini dalam APBD hanya tercantum dana hibah dalam penyelenggaraan pilkada Rp 13 miliar.

Dari anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2015 untuk pilkada, Pemkab mengalokasikan KPU Rp 10,3 miliar, Panwas Rp 1,5 miliar, Polres Rp 900 juta, Kodim Rp 250 juta. Namun, KPU menilai anggaran Rp 10,3 miliar tidak cukup dan idealnya Rp 11,9 miliar dan itu hanya untuk keperluan KPU. Sementara pihak Polres juga mengusulkan anggaran pengamanan Rp 4,08 miliar dan Panwaslu Rp 1,3 miliar.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Putu Dwita dan jajaran seusai rapat kerja (raker) membahas anggaran Pilkada, Selasa (7/4) mengatakan untuk mengatasi kekurangan anggaran Pilkada 2015 pihaknya akan mengusulkan percepatan perubahan APBD 2015. Sehingga semua bisa diatasi karena ini merupakan pertaruhan nama daerah.

Rapat kerja kemarin juga dihadiri Sekda Gede Gunadnya, dan Kapolres AKBP Harry Hariyadi, serta Ketut Gede Tangkas Sudiantara dari KPU Jembrana beserta anggota serta Kabag Keuangan. Dalam pertemuan tersebut juga belum ada titik temu apakah guna menyikapi kekurangan anggaran, nantinya dana hibah untuk KPU bisa diberikan dua kali dalam tahun anggaran 2015. Ataukah ada solusi lainnya untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Karena Pemkab hanya bisa memberikan hibah kepada KPU.

Sekda Gunadnya mengharapkan agar anggaran yang diusulkan oleh KPU lebih realistis sehingga tidak ada silpa. "Anggaran di APBD induk memang Rp 13 miliar. Karena ada kekurangan nanti akan dikoordinasikan dengan TAPD, apakah bisa diusulkan kembali di perubahan dan harapan kami pilkada berjalan dengan aman dan sukses," jelasnya.

Dikatakan dari dana Rp 13 miliar itu sudah *include* dengan dana keamanan dan semua dihibahkan ke KPU. Ditekankan jangan karena KPU tidak mau menerima dana titipan untuk keamanan, nanti pilkada terhambat. Pemkab katanya tidak bisa langsung memberikan dana ke instansi vertikal karena tidak sesuai dengan Permendagri No 32/2012 tentang pemberian dana hibah dan sosial.

Sementara KPU mengacu pada Permendagri No 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015. "Jika nanti kami berikan dana keamanan kepada Polres, sementara Polres harus meminta izin ke atasan, ini prosesnya akan panjang dan di satu sisi pilkada sudah mendesak. Kami mengharapkan agar pilkada berjalan dengan aman," tandasnya.

Sekda juga mempertanyakan apakah dalam pelaksanaan Pilkada KPU bisa bekerja tanpa didukung keamanan. "Ini yang harus dicarikan solusinya sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Dengan dana hibah itu KPU nanti bisa membuat pakta integritas dengan Polres, dan bukan KPU nanti yang mempertanggungjawabkan. Yang mempertanggungjawabkan tetap pihak keamanan. Kami harapkan jangan sama-sama sakelek karena jika tidak ada titik temu tahapan tidak akan jalan," kata Gunadnya.

Sementara itu Kapolres AKBP Harry Hariyadi mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pilkada dan harus selalu siap untuk menjaga keamanan. Namun untuk mendukung kesuksesan keamanan tersebut jelas banyak hal yang harus diperhitungkan, karena pengamanan yang dilakukan juga tergantung tahapan yang dilakukan.

Ketut Gede Tangkas Sudiantara, anggota KPU Jembrana juga mengharapkan agar hubungan terjalin dengan baik dengan semua instansi sehingga pelaksanaan pilkada berjalan aman dan sukses. Terkait anggaran dengan dana Rp 11,9 miliar akan berusaha dimaksimalkan. **(kmb)**

hal. 2

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 14.

Bali Post

BPK Soroti Raskin dan Kasus Denny

Jakarta (Bali Post) -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 1,42 triliun. Selain itu, auditor negara tersebut juga menemukan adanya potensi kerugian negara Rp 3,77 triliun dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 9,55 triliun. Demikian hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II-2014 yang disampaikan BPK dalam rapat paripurna DPR, di Gedung DPR, Selasa (7/4) kemarin.

Ketua BPK Harry Azhar Azis menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari pemeriksaan atas 651 objek pemeriksaan. Dari jumlah objek pemeriksaan sebanyak itu diperoleh sekitar 7.950 temuan pemeriksaan. Pemeriksaan BPK meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Beberapa hal yang disampaikan dalam laporan BPK antara lain dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) yang dinilai masih terdapat banyak masalah. Misalnya penetapan target *lifting* migas dalam APBN/APBN-P tidak didasarkan pada target *lifting* yang telah disepakati dalam *work program and budget* antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Juga di sektor pajak, BPK menemukan adanya potensi kerugian dari penerimaan pajak dan migas senilai Rp 1,12 triliun.

Persoalan lain adalah belanja infrastruktur di Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM). BPK menemukan adanya 137 kontrak proyek pembangunan transmisi dan gardu induk yang terhenti. Penyebabnya, pembebasan lahan yang berlarut-larut.

Temuan lain BPK adalah program penyaluran subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang tidak tidak sesuai target. Anggaran program subsidi raskin tahun 2014 sebesar Rp 18,16 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp 17,19 triliun.

Dalam kasus aktual, BPK juga melakukan perhitungan terhadap dugaan adanya kerugian negara atas kasus *payment gateway* yang telah menyeret mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka. BPK telah menemukan adanya permasalahan dalam implementasi program pelayanan pembuatan paspor elektronik tersebut.

Pemeriksaan dilakukan periode 2013 dan semeter I tahun 2014 yang hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM telah cukup efektif dalam pelayanan paspor. Bahkan, dinilai telah melakukan perbaikan proses bisnis paspor dalam penerapan sistem pelayanan paspor terpadu (SPPT). Dengan begitu, masyarakat dan petugas pemberi layanan menjadi lebih nyaman dan puas dalam pengurusan paspor.

Kendati demikian, BPK menemukan adanya persoalan dalam perubahan mekanisme pembayaran berupa pembayaran elektronik dengan *payment gateway*. Antara lain, implementasi *payment gateway* mengabaikan risiko hukum. Mulai tender pemilihan vendor dilakukan pada saat tim E-Kemenkum HAM belum memiliki kewenangan. Selain itu, rekening bank penampung hasil *payment gateway* yang masuk kategori Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak memiliki izin dari Menteri Keuangan. **(kmb4)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 19

Bali Post

Anggota DPRD Bali Dapat Jatah Hibah Bansos Rp 4,5 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Ketegangan di internal anggota DPRD Bali termasuk dengan pihak eksekutif (Pemprov Bali) terkait jatah dana hibah dan bansos (bantuan sosial) bagi anggota dewan, akhirnya mereda. Pasalnya sudah ada kesepakatan antara dewan dengan pihak eksekutif terkait jatah hibah bagi seluruh anggota dewan (*incumbent* dan *new comer*) di APBD Perubahan 2015 dan APBD Induk 2016.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Nyoman Suyasa, Selasa (7/4) kemarin, mengatakan di APBD Perubahan 2015 masing-masing anggota dewan mendapat jatah memfasilitasi dana hibah bansos Rp 750 juta sementara di APBD Induk 2016 sebesar Rp 3,75 miliar. Sehingga total jatah hibah bagi anggota dewan di APDB Perubahan 2015 dan APBD Induk 2016 sebesar Rp 4,5 miliar.

"Sudah ada kesepakatan dewan dengan pihak eksekutif soal jatah hibah dan setiap anggota dewan mendapat sama rata. Jadi tidak ada lagi istilah diskriminatif, tidak ada *new comer* dan *incumbent*," imbuh Suyasa. Ia menerangkan kesepakatan soal jatah alokasi dana hibah bansos ini telah dibahas antara pimpinan DPRD Bali, pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Bali bersama pihak eksekutif yang diwakili Sekretariat Daerah (Sekda) Cok. Pemayun. "Ketua-ketua fraksi punya tugas menyampaikan ke anggotanya soal dana hibah bansos bahwa kemampuan anggaran pihak eksekutif seperti itu. Hal ini agar tidak terjadi lagi miskomunikasi dan kecurigaan-kecurigaan di antara teman-teman anggota dewan," imbuh Suyasa yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Karangasem itu. **(wid)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 9

Bali Post

Bali Post/asa

KOORDINASI - *Kepala SMPN 1 Nusa Penida tampak berkoordinasi dengan kuasa hukumnya, Gede Bina.*

Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS

Kepala SMPN 1 Nusa Penida Dituntut Empat Tahun

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 3

Bali Post

Sambungan . .

Denpasar (Bali Post) -

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Selasa (7/4) kemarin membacakan tuntutan terkait kasus dugaan korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMPN 1 Nusa Penida, Klungkung. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Early Sulistyorini, JPU I Dewa Made Mertayasa dkk. menyatakan kedua terdakwa yakni I Wayan Sutama selaku Kepala SMPN 1 Nusa Penida dan I.B. Ketut Darma Putra selaku Bendahara BOS bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh jaksa, Sutama dituntut selama empat tahun penjara. Jaksa juga menuntut terdakwa supaya membayar denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 496.172.364. Dengan ketentuan, apabila tidak bisa membayar uang pengganti itu dalam sebulan, maka harta bendanya disita dan dilelang. Jika tak mencukupi, diganti dengan pidana penjara dua tahun.

Sementara Bendahara BOS Darma Putra dituntut hukuman lebih ringan. Dia dituntut tiga tahun enam bulan (3,5 tahun) oleh JPU dari Kejari Klungkung itu. Sebagaimana disampaikan dalam amar tuntutannya, JPU I Dewa Made Mertayasa, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primer, sehingga dia dibebaskan dari dakwaan primer. Namun, kata jaksa, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sesuai dengan dakwaan subsider yakni Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU No. 20 tentang perubahan atas UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelum membacakan kesimpulan tuntutan, jaksa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal, baik yang meringankan maupun yang memberatkan. Hal yang memberatkan, terdakwa Darma Putra telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 375.247.036. Terdakwa juga merasa tidak bersalah dan tidak ada pengembalian kerugian negara tersebut. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan.

Atas tuntutan itu, hakim memberikan kesempatan pada terdakwa untuk memberikan tanggapan. Setelah berkoordinasi dengan tim kuasa hukumnya, yang kemarin dikomando Gede Bina, kedua terdakwa menyerahkan pada kuasa hukumnya. Gede Bina yang berasal dari Songan, Kintamani itu pun menyatakan bahwa tim kuasa hukum di bawah naungan Warsa T. Bhuana itu akan melakukan pembelaan (pledoi) dalam sidang pekan depan. **(kmb37)**

2

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 3

Bali Post

Kredit Ketahanan Pangan Terserap Rp 68 Miliar

Tabanan (Bali Post) -

Mendukung pengembangan sektor pertanian, pemerintah menggelontorkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) kepada petani. Untuk di Tabanan, salah satu lembaga keuangan yang menyalurkannya adalah Bank BPD. Sepanjang tahun 2015 dana KKP-E yang telah terserap Rp 68,3 miliar yang diberikan kepada 619 debitur dengan bunga rendah.

Kepala Bank BPD Bali cabang Tabanan I.B. Ary Wijaya Guntur, Selasa (7/4) kemarin memaparkan, tahun 2015 ini dari plafon dana penguatan modal tersebut nilai Bagi Debet (BD) per Maret 2015 mencapai Rp 50,6 miliar.

Rata-rata plafon kredit yang diberikan untuk program ini berkisar Rp 100 juta per petani. Besarnya bantuan dana berbunga rendah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar dari para petani yang bersangkutan.

Bank BPD Bali secara umum memiliki banyak produk kredit program yang khusus untuk sektor pertanian dalam arti luas. Selain KKP-E, juga ada program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) dan yang lainnya.

Menurut Ida Bagus Ary, khusus untuk produk penguatan modal pada program LUEP di Kabupaten Tabanan yang disalurkan melalui Bank BPD Bali cabang Tabanan hingga Maret 2015 mencapai hingga Rp 11,862 miliar. "Dana tersebut diperuntukan untuk membeli gabah atau hasil panen petani pada musim panen. Di Tabanan, debitur penerima bantuan LUEP ini mencapai 57 pengusaha penggilingan padi," ujarnya.**(kmb24)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 13

Bali Post

Persidangan Kasus Candra, JPU Siap Hadirkan Lima Saksi Ahli

Semarapura (Bali Post) -

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan lima saksi ahli di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Dermaga Gunaksa. Kelima saksi ahli itu akan memberikan keterangan sesuai kompetensinya dalam kasus dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung Wayan Candra.

Pejabat Pengelola Informasi Publik Kejari Klungkung, Suhadi, Selasa (7/4) kemarin mengatakan, persidangan perkara Candra dilaksanakan Rabu (8/4) hari ini dan Kamis (9/4) besok. Kelima saksi ahli itu, antara lain ahli pertanahan Dr. Iwan Permadi, S.E., S.H., M.Hum. dari Universitas Brawijaya, Ahli Keuangan Drs. Sujanto, DEA., saksi ahli dari BPKP Bali Doso Sukendro, saksi ahli dari PPATK Muhammad Novianto dan terakhir saksi ahli Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya Adam Chasawi. Pihaknya sengaja mencari saksi ahli yang cukup jauh, untuk menjaga segala kemungkinan terburuk.

Salah satunya, dugaan intimidasi dan pengaruh negatif lain dari pihak terdakwa. Keterangan para ahli sangat diperlukan untuk membuka lebih gamblang terhadap tiga perkara yang menjerat Candra. Suhadi menegaskan, misalnya ahli pertanahan, keterangan sangat dibutuhkan berkaitan dengan proses pengadaan tanah yang dilakukan saat itu, dimana proses ini menjadi fokus dalam penanganan kasus ini. Sehingga, dinilai ada upaya penyalahgunaan wewenang baik oleh bupati saat itu, maupun Panitia Pengadaan Tanah. Kemudian, ahli keuangan, terkait dengan proses pembuatan rekening hingga penggunaannya selama terdakwa memanfaatkannya. Demikian juga saksi ahli PPATK, akan memberikan gambaran, seperti apa aliran dana terdakwa hingga dugaan terjadinya gratifikasi itu dan relevansinya terhadap kasus yang menjerat Candra.

Selain menyiapkan saksi ahli, Suhadi mengatakan, dari beberapa agenda persidangan sebelumnya, ada beberapa keterangan yang disampaikan para saksi yang perlu dianalisa lebih jauh. Khususnya nama-nama lain yang disebutkan saksi dipakai terdakwa atas nama untuk pembelian tanah maupun untuk mendapatkan kredit di bank. "Ada 32 nama orang lain yang digunakan untuk atas nama pembelian tanah dan mendapat kredit bank. Nama mereka dipakai, tapi mereka tidak dapat kredit, itu artinya apa?" tanya Suhadi.

Suhadi menegaskan, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka baru dalam kasus ini. Sehingga, ia pun membantah adanya pemberitaan penetapan tersangka baru bernisial GAW dan kasusnya dihentikan dengan SP3. **(kmb31)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015
Hal : 16

Bali Post

Disetujui, Sueca Antara Tahanan Kota

Negara (Bali Post) -

Tersangka II kasus BBM bersubsidi Made Sueca Antara yang juga anggota DPRD Jembrana dari PDI-P, pascaditahan Senin (6/4) sore lalu menangis di dalam tahanan. Menurut Kasat Reskrim AKP Gusti Made Sudarma Putra, Selasa (7/4) kemarin, sejak berada dalam sel tahanan Polres, Sueca Antara terus saja menangis. Termasuk saat dibesuk Kasat Reskrim Senin malam, tangis Sueca pecah.

"Ia mengaku tidak kuat berada dan berlama-lama di dalam sel. Apalagi di dalam sel tersebut ia hanya seorang diri," kata Sudarma Putra. Dari informasi kuasa hukumnya, Ida Bagus Panca Sidarta dan Made Merta Dwipa Negara sudah mengajukan permohonan pengalihan penahanan ke Kapolres AKBP Harry Hariyadi. Permohonan pengalihan penahanan dari tahanan di sel Polres ke tahanan kota diajukan saat tersangka ditahan Senin sore lalu dan dari informasi surat itu disetujui Kapolres.

Sebagai penjamin dalam surat permohonan tersebut adalah istri tersangka, Ni Ketut Priwati. Sueca Antara akan segera dilepas dan menjalani tahanan kota setelah berkas dan tersangka diserahkan ke Kejaksaan, Rabu (8/4) hari ini. Tahanan kota ini berlaku sejak 6-26 April 2015 mendatang.

Sudarma Putra juga mengatakan persetujuan Kapolres berkaitan pengalihan penahanan tersebut memang sudah ada, namun penerapannya Rabu (8/4) pagi. Penahanan yang dilakukan katanya untuk memperlancar proses penyerahan berkas dan tersangka ke kejaksaan. Namun sampai saat ini tersangka masih ditahan di Sel Polres. "Besok kami akan menyerahkan berkas dan tersangka (tahap kedua) ke Kejaksaan Negeri Negara. Kalau kami lepas sekarang, takutnya besok tidak bisa dilakukan tahap kedua sesuai rencana," kata Sudarma Putra.

Sebelumnya tahap kedua direncanakan Kamis (9/4) karena Rabu (8/4) Kasi Pidsus harus memimpin pasukannya mengikuti sidang kasus yang sama dengan tersangka mantan Kadis Perindagkop Made Ayu Ardini di Pengadilan Tipikor Denpasar. Namun

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 14

Bali Post

Sambungan.

setelah dilakukan koordinasi, tahap kedua bisa dilakukan Rabu hari ini.

Sementara itu Kajari Teguh Subroto melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Putu Sauca Arimbawa Tusan mengakui tahap kedua kasus korupsi BBM bersubsidi dengan tersangka anggota DPRD Made Sueca Antara dilakukan Rabu (8/4) hari ini. Namun, terkait dengan tahanan kota Sueca mengaku belum tahu.

Menurutnya kemungkinan jika pengalihan penahanan tersebut sudah disetujui, Kajari bisa mengambil keputusan untuk menerapkan tahanan kota bagi tersangka. Apalagi sebelumnya Made Ayu Ardini, tersangka I kasus BBM bersubsidi juga dikenakan tahanan kota.

Diberitakan sebelumnya dari hasil audit BPKP Provinsi Bali, negara mengalami kerugian sebesar Rp 261,248 juta lebih akibat pemberian izin penggunaan BBM solar bersubsidi pada UD Sumber Maju yang dimiliki Made Sueca Antara. Dengan dikeluarkannya rekomendasi tersebut, UD Sumber Maju sudah membeli solar bersubsidi sebanyak 45.449,54 liter untuk melakukan produksi pengolahan sabut kelapa.

Made Ayu Ardini ditetapkan tersangka sebagai pihak pemberi rekomendasi pembelian BBM bersubsidi kepada UD Sumber Maju. Sementara Sueca Antara selaku penerima manfaat atas rekomendasi tersebut karena posisinya sebagai pemilik UD Sumber Maju. Karena menurut penyidik, UD Sumber Maju tidak berhak mendapat solar bersubsidi mengingat perusahaan itu masuk kategori usaha kecil dan menengah. **(kmb)**

hal. 2

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 14

Bali Post

Dikhawatirkan Berpindah Tangan

Pemkab Diminta Telusuri Lahan Estuaridam

Semarapura (Bali Post) -

Pemkab Klungkung diminta menelusuri dan mendata aset lahan di eks galian C Gunaksa yang dibebaskan untuk pembangunan estuaridam tahun 2002. Aset lahan seluas 1,775 hektar (ha) itu dilaporkan tidak tercatat di Bagian Perlengkapan Setda Klungkung dan dikhawatirkan telah berpindah tangan.

"Kenapa aset seluas itu bisa lenyap? Lahannya sudah jelas jadi aset pemerintah daerah setelah pembebasan dengan anggaran Rp 1,050 miliar," ujar Anggota DPRD Klungkung Wayan Mastra, Selasa (7/4) kemarin. Mastra mengaku khawatir aset tersebut sudah berpindah kepemilikan di tengah polemik yang terjadi di lahan eks galian C tersebut saat ini. "Aset-aset yang menjadi milik pemerintah daerah harus tercatat dengan jelas, agar dapat dipertanggungjawabkan," sarannya.

Rencana pembangunan estuaridam, menurutnya dulu sudah pernah dijabarkan dalam tahap pembicaraan serius antara legislatif dan eksekutif. Pembangunan estuaridam dilatarbelakangi oleh potensi air yang dimiliki hilir kali Unda yang belum termanfaatkan. Sementara kabupaten/kota lain di Bali, mengalami masalah pada ketersediaan air bersih. Sehingga, pembangunan estuaridam ini pendanaannya rencanannya dilakukan dengan konsorsium bersama lima kabupaten/kota di Bali. Antara lain, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung (Sarbagitaku). "Klungkung saat itu sebagai penyedia lahan, tapi kantornya justru direncanakan dibangun di Denpasar. Itu yang membuat kami (DPRD, *red*) dulu tidak setuju," kata Mastra.

Belum selesai masalah persoalan kantor, Mastra mengatakan Badung saat itu justru ingin lepas sendiri. Setelah itu, rencana estuaridam ini dibangun secara konsorsium semakin menjadi runyam. Opsi selanjutnya, rencana menawarkan pembangunan estuaridam ini kepada investor juga sia-sia. "Belum ada investor yang berminat menggarap pembangunan estuaridam tersebut. Padahal, perencanaan pembangunan saat itu sudah ada di Bappeda Klungkung. Sekarang, kalau pembangunannya batal, minimal asetnya masih ada," ujarnya.

Mantan Bupati Klungkung saat itu, Tjokorda Gde Ngurah juga membenarkan ada rencana pembangunan estuaridam dan ada pembebasan lahan. Ia mengakui pembangunannya akhirnya gagal karena tidak ada investor yang berminat. Penerusnya saat itu, mantan bupati dua periode Wayan Candra juga gagal mewujudkan proyek ini. Ditanya soal keberadaan aset yang sudah dibebaskan tahun 2002 itu, Tjok. Ngurah sangat yakin, aset itu terdaftar di Bagian Perlengkapan saat dirinya masih menjabat sebagai bupati tahun 2002.

Kabag Perlengkapan Ketut Sena justru mengaku tidak ada lahan di kawasan eks Galian C yang tercatat sebagai aset Pemkab Klungkung. Sepengetahuannya, aset pemkab berupa lahan, ada di beberapa tempat lain. Salah satunya terdapat di Desa Pesinggahan seluas 39 are. Aset Pemkab di Desa Pesinggahan ini sudah ada sertifikatnya di Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan. Rencananya di atas aset tersebut akan dibangun pelabuhan marina, dimana saat ini sudah masuk dalam tahap kajian dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). **(kmb31)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015
Hal : 16